

**DAMPAK UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA
KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PULAU SULAWESI
(2014-2018)**

Endrico Geraldo Teneh¹, Anderson G. Kumenaung², Amran T. Naukoko³

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : endricoteneh061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data kuantitatif dengan metode analisis data panel. Penelitian ini menunjukkan secara simultan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan secara parsial Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Upah Minimum Provinsi (UMP), penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat*

ABSTRACT

Wages is defined as an acceptance in return for a person's work to the recipient for a work or service that has been done. Serves as a guaranteed survival of life for humanity and is declared and in value in the form of money stipulated by an agreement, laws and regulations are paid on the basis of a working agreement between the Giver Work and recipients. The research aims to determine the effect of provincial Minimum wage (UMP) on labour absorption and the influence of provincial Minimum wage on community welfare. This research uses quantitative data retrieval techniques with a panel data analysis method. This research shows simultaneous provincial Minimum wage (UMP) affects the absorption of manpower and welfare of the community, whereas partially provincial Minimum wage (UMP) has no significant effect on energy absorption and provincial Minimum wage (UMP) has significant effect on community wellbeing

Keywords : *provincial Minimum wage (UMP), labour absorption, community welfare*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia menetapkan upah minimum berdasarkan UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerjaan/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Nomor 13 tahun 2003 diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selain memberi jaminan pekerja/buruh penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Program pencapaian upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menunjukkan perbaikan nyata. Hal ini dimaksudkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup akan dicapai secara bertahap.

Pada kenyataannya upah yang diterima oleh tenaga kerja di sebagian besar provinsi adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak. Kenaikan harga akan berakibat pada kenaikan Kebutuhan Hidup Layak dan selanjutnya akan meningkatkan upah minimum. Dilihat dari sisi perusahaan, upah adalah biaya, yang biasanya digunakan sebagai acuan untuk menetapkan melalui harga. UMP biasanya digunakan sebagai acuan untuk menetapkan upah pekerja di sektor formal, oleh karena itu kenaikan UMP yang lebih tinggi daripada produktivitas pekerja akan merugikan perusahaan karena dapat menaikkan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi berarti harga output menjadi bersaing, dan pada gilirannya perusahaan akan mengurangi outputnya. Penurunan output selanjutnya akan menurunkan penggunaan faktor produksi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang berpendidikan rendah.

Secara teoritis, perusahaan hanya akan membayar upah tenaga kerja sesuai dengan produktivitasnya, artinya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah akan menerima upah yang rendah dan sebaliknya. Pada kenyataannya, upah minimum yang ditetapkan lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi determinan utama dalam penentuan upah (Bappenas (2010:61).

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi social dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja.

Dijaman globalisasi seperti ini, permasalahan tentang sumber daya manusia (tenaga kerja) dalam suatu perusahaan menuntut untuk lebih diperhatikan, sebab secanggih apapun teknologi yang dipergunakan dalam suatu perusahaan serta sebesar apapun modal yang diputar perusahaan, tenaga kerja tetap merupakan asset yang paling utama dalam kehidupan perusahaan karena tanpa adanya karyawan maka peralatan dan modal tidak mungkin akan dapat dipergunakan secara maksimal. Tenaga kerja merupakan sebagai salah satu elemen utama dalam suatu sistem kerja, sehingga tenaga kerja masih sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Temuan studi ini tidak mendukung teori Marshall (Pressman, 2002:95), bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan tenaga kerja untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik. Kedua hal ini dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare, dan quality of life*. Brudeseth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia sebagai tolak ukur kesejahteraan suatu daerah.

Tinjauan Pustaka

Upah

Menurut Sadono Sukirno (2002:353) upah merupakan imbalan jasa yang di terima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan memengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 jangkauan wilayah upah minimum meliputi:

- a. Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- b. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota.

- c. Upah minimum sektoral provinsi (UMPProp) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota dan satu provinsi
- d. Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSKab) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten/kota.

Menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum provinsi adalah upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Besarnya upah minimum untuk setiap wilayah provinsi atau kabupaten kota tidak sama karena tergantung nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah bersangkutan.

Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa.

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002)

Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare* dan *quality of life*. Brudeseth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Indeks (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan penetapan upah minimum adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhannya hidup minimalnya, oleh karena itu penetapan upah minimum didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dilihat dari sisi perusahaan, upah adalah biaya, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga. UMP biasanya digunakan sebagai acuan untuk menetapkan upah pekerja di sektor formal, oleh karena itu kenaikan UMP yang lebih tinggi daripada produktivitas pekerja akan merugikan perusahaan karena dapat menaikkan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi berarti harga output menjadi tidak bersaing, dan pada gilirannya perusahaan akan mengurangi outputnya. Penurunan output selanjutnya akan menurunkan penggunaan faktor produksi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang berpendidikan rendah.

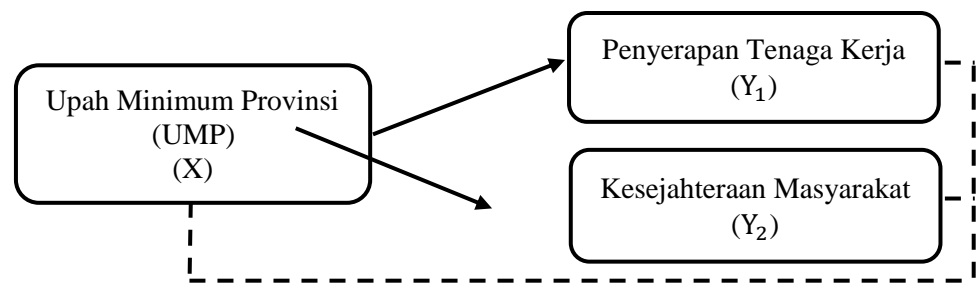
Pengaruh Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Temuan studi ini tidak mendukung teori Marshall (Pressman, 2002:95), bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan tenaga kerja untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik. Kedua hal ini dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Adapun yang menjadi Variable Independen dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Provinsi (X), dan yang menjadi Variable Dependen adalah Penyerapan Tenaga Kerja (Y_1), Kesejahteraan Masyarakat (Y_2). Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan

- > Pengaruh variable bebas terhadap variable terikat secara parsial
- - - - - Pengaruh variable bebas terhadap variable terikat secara simultan
- 1. Upah Minimum Provinsi (UMP) (X) berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y_1)
- 2. Upah Minimum Provinsi (UMP) (X) berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_2)
- 3. Upah Minimum Provinsi (UMP) (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y_1) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y_2).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, kemudian ditabulasi dengan menggunakan program komputer Eviews. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode Analisis Data Panel. Adapun rumusnya sebagai berikut:

Bentuk Ekonometriknya adalah sebagai berikut:

$$UMP = \beta_0 + \beta_1 PTK_{it} + \beta_2 KM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

UMP = Upah Minimum Provinsi

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

KM = Kesejahteraan Masyarakat

β = Koefisien Regresi

ε = error term

1. Uji Spesifikasi Model

- a) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow Uji spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model fixed effect atau model common effect yang sebaiknya dipakai.

H_0 : Common Effect

H_a : Fixed Effect

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah fixed effect. Ketika model yang terpilih adalah fixed effect maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM).

- b) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausmann Uji ini bertujuan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM). Dalam FEM setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan time-invariant. Sedangkan dalam REM, intersep (bersama) mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (cross section) dan komponen mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati : 2013). Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut :

H_0 : Random Effect Model

H_a : Fixed Effect Model

Jika hipotesis 0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai FEM. Karena REM kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas. Sebaliknya, apabila H_0 ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai adalah REM.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan Jargue-Bera test atau J-B test yaitu apabila probabilitas >5%, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

diantara variabel bebas. Apabila variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel tidak ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan tetap, maka kondisi ini disebut homoskedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heteroskedastis. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastis. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastis adalah dengan me-regress model dengan log residu kuadrat sebagai variabel terikat.

H_o : homoskedastis

H_a : heteroskedastis

Apabila, probabilitas dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05 maka terjadi penerimaan terhadap H_o . Sehingga tidak terdapat heteroskedastis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homoskedastis.

d) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (untuk data times serie) atau ruang (data cross-section). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW).

3. Uji Signifikansi

a) Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob $F <$ taraf sig 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b) Uji Parsial (t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t hitung, ketika prob $<$ taraf sig 5%, maka H_o ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau goodness of fit digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai dari R^2 berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang dibuat dan sebaliknya.

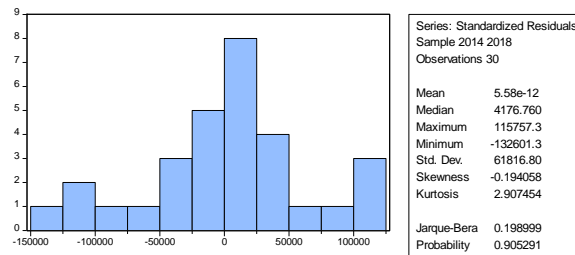
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data-data variabel penelitian yang telah dikumpulkan dan diolah dengan program EVIEWS 9 maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan Jargue-Bera test atau J-B test yaitu apabila nilai probability > 0.05, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.



Berdasarkan output, nilai probability sebesar 0,905291 lebih besar dari 0,05 maka variable-variabel tersebut berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW).

Tabel 1. Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$du < d < 4-du$

Sumber : Damodar Gujarati, *Basic Econometrics*

Dari hasil uji DW yang telah dilakukan, didapatkan hasil *Durbin-Watson stat* sebesar 1.285816. sedangkan $d_L=1.2837$ dan $d_u= 1.5666$. karena nilai d hitung lebih besar dari d_L dan lebih kecil dari d_u , maka dapat disimpulkan tidak terdapat gangguan autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 2. Output Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-166726.0	213014.7	-0.782697	0.4406
Y1	-0.013537	0.007545	-1.794054	0.0840
Y2	3411.569	3206.602	1.063920	0.2968

Sumber : Output Eviews 9

Hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh variabel menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat heteroskedastis dalam model tersebut.

Uji Multikolinearitas

Uji multikoliniearitas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Output Uji Multikoliniearitas

	Y1	Y2
Y1	1.000000	0.469334
Y2	0.469334	1.000000

Dari hasil uji yang dilakukan, semua koefisien korelasi kurang dari 0,8. Maka dapat disimpulkan model tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

Uji Chow

Pertama-tama data panel diesmitasi menggunakan efek spesifikasi fixed. Uji yang dilakukan yaitu uji Chow. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan fixed effect atau common effect.

H_o : Common Effect

H_a : Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 0,05, maka ditolak. Sehingga model menggunakan fixed effect, hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi fixed adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil tes *Rebundant Fixed Effect-Likelihood Ratio*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	95.407628	(5,22)	0.0000
Cross-section Chi-square	93.649202	5	0.0000

Sumber : Output Eviews 9

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square sebesar 0,0000 sehingga menyebabkan ditolak. Maka model fixed adalah model yang sebaiknya digunakan.

Correlated Random Effect-Hausmann Test

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik digunakan dari fixed effect.

H_o : Random Effect

H_a : Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-square lebih dari 0,05%, maka sebaiknya model menggunakan *random effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi random adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	25.919573	2	0.0000

Sumber : Output Eviews 9

Hasil probabilitas chi-square sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya menggunakan fixed effect.

Analisis Data Panel

Dari uji spesifikasi di atas, maka model sebaiknya menggunakan estimasi dengan efek tetap (fixed effect). Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Hasil estimasi model regresi data panel adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Estimasi Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18060748	1101577.	-16.39535	0.0000
PENYERAPAN TENAGA KERJA	0.459586	0.298770	1.538263	0.1382
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	284679.8	20132.55	14.14028	0.0000

Sumber : Output Eviews 9

Dari hasil data diatas diketahui probabilitas untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat signifikan dalam taraf error 0,05. Sedangkan untuk variabel Penyerapan Tenaga Kerja memiliki probabilitas 0,1382 yang berarti bahwa variabel ini tidak signifikan.

Hasil Uji Signifikan

Uji Simultan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Eviews 6, diperoleh nilai F-hitung sebesar 125.6575 dan probabilitas F sebesar 0,000000. Dalam taraf signifikansi 0,05 dan f tabel sebesar 3,34 maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap UMP.

Uji Parsial

Hasil analisis uji parsial menunjukkan variabel bebas secara individu signifikan mempengaruhi variabel terikat kecuali variabel Penyerapan Tenaga Kerja.

Pengaruh UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Penyerapan Tenaga Kerja memiliki t-hitung sebesar 1.538263 dan probabilitas sebesar 0,1382, dalam taraf signifikansi 0,05 maka variabel Penyerapan Tenaga Kerja secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi UMP.

Pengaruh UMP terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kesejahteraan Masyarakat memiliki t-hitung sebesar 15.14028 dan probabilitas sebesar 0,0000, dalam taraf signifikansi 0,05 maka variabel Kesejahteraan Masyarakat secara individu signifikan dalam mempengaruhi UMP.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* diperoleh angka sebesar 0.975599. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 97,5%. Sisanya sebesar 2,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data panel pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di setiap provinsi di pulau Sulawesi dalam 5 tahun terakhir dari 2014 sampai 2018. Dari hasil pengolahan data panel dengan metode *fixed effect* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$UMP = -18060748 + 0.459586PTK_{it} + 284679.8KM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

UMP = Upah Minimum Provinsi

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

KM = Kesejahteraan Masyarakat

Pada tabel hasil estimasi model dan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa koefisien konstanta sebesar -18060748. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi kedua variabel terikat akan tetapi tidak masuk dalam model. Koefisien dari variabel-variabel tersebut secara akumulasi bernilai positif. Karena tidak masuk dalam model, angka-angka sistematis tersebut masuk ke dalam konstanta. Sehingga menyebabkan koefisien konstanta menjadi negatif. Adapun variabel bebas dalam model yang mempengaruhi kedua variabel terikat dijelaskan sebagai berikut :

UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara individu variabel UMP tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di setiap Provinsi di pulau Sulawesi. Nilai probability 0.1382 lebih besar dari alpha 0,05, dan juga bisa dilihat dari hasil uji t, Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Penyerapan Tenaga Kerja memiliki t-hitung sebesar 1.538263 dan probabilitas sebesar 0,1382, dalam taraf signifikansi 0,05 maka variabel Penyerapan Tenaga Kerja secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi UMP

UMP terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel UMP baik secara individu maupun simultan signifikan dalam mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di seluruh Provinsi di pulau Sulawesi. Nilai koefisien regresi sebesar 284679.8 menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di setiap Provinsi di pulau Sulawesi. Hal ini berarti apabila UMP meningkat sebesar 1 juta, akan berpengaruh pada Kesejahteraan Masyarakat sebesar 28,8%.

IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia secara rata-rata. Komponen dari perhitungan IPM meliputi angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf, rata-rata

lama sekolah serta kemampuan daya beli. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan yang tinggi pada masyarakat. Hal ini akan berdampak pada rendahnya angka kematian sehingga terdapat banyak penduduk usia non-produktif. Akan tetapi usia senja biasanya tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tetapi tidak banyak. Hal ini berpotensi besar dalam meningkatnya ketimpangan UMP di setiap Provinsi di pulau Sulawesi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Pengaruh UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan. Kembali ke teori yang menyatakan bahwa UMP berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Untuk kasus diseluruh provinsi di pulau Sulawesi berbeda karena hasil analisis data menunjukkan nilai probabilitas 0.1382 lebih besar dari alpha 0,05 dan juga uji lainnya. Pada kenyataannya upah minimum yang ditetapkan lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Pada kasus ini UMP bukanlah salah satu alasan terserapnya tenaga kerja di pulau Sulawesi melainkan kesediaannya lapangan pekerjaan, pendidikan, dll.
- Pengaruh UMP terhadap Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh signifikan. Dikarenakan UMP dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Jika UMP naik maka tingkat kesejahteraan masyarakat di pulau Sulawesi pula meningkat.

Saran

Perlu disusun suatu standar baku bagi lembaga pelatihan agar dapat memenuhi kriteria sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui jalur pendidikan non formal. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan memperluas jangkauan dan pelayanannya. Perlu adanya peningkatan lagi UMP di setiap Provinsi. Dikarenakan variabel terikat hanya berjumlah 2 variabel maka diminta kepada peneliti selanjutnya melakukan penelitian terhadap variabel lainnya yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di pulau Sulawesi.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS . (2010). Laporan Pencapaian Tujuan pembangunan Milenium Indonesia 2010. BAPPENAS atau KPPN
- Depnakertrans, 2004. Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, Majalah Nakertrans Edisi – 03 TH.XXIV – Juni.
- Gujarati, D. N. 2013. Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima. Mangunsong, R. C., penerjemah. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro. 2002. Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Pressman, R. S. (2002), Rekayasa Perangkat Lunak, ANDI, Buku I, Yogyakarta.
- Sukirno, S. 2002. Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: Jakarta.
- Simanjuntak, P. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, FE UI : Jakarta.